



ANALISIS EFEKTIFITAS PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI DALAM MENANGULANGI KEMISKINAN DI KOTA MATARAM

Ainul Jeriah¹; Siti nurfadilah²

¹*Facilty of Social and Political Sciences, Muhammadiyah University of Mataram, NTB*

²*Faculty of Medicine And Health Sciences, Muhammadiyah University Makassar*

¹*Correspondence Email: ainul2022bm@gmail.com*

Received: 22 Juli 2024

Accepted: 25 Desember 2024

Published: 30 Desember 2025

Abstract

This study evaluates how effective the Direct Cash Assistance (BLT) Program is in addressing poverty in Mataram City. This study focuses on the impact of BLT on the economic, social, and psychological conditions of recipients, and assesses technical obstacles that arise in the implementation of the program, such as mistargeting, lack of supervision, and suboptimal use of funds. Using qualitative and quantitative approaches, data were obtained from field observations, interviews, and official documents. The findings of this study indicate that although BLT provides short-term benefits in maintaining purchasing power and a sense of security for the community, this program has not succeeded in creating sustainable economic independence without the support of education and empowerment. This study recommends that BLT be integrated with economic empowerment programs and increased accountability and routine evaluation as a strategy to strengthen poverty alleviation programs.

Keywords: *Direct Cash Assistance (BLT), Poverty, Economic Empowerment, Mataram City*

A. Introduction

Kemiskinan adalah salah satu isu lama yang masih menjadi tantangan besar bagi banyak negara yang sedang berkembang, termasuk Indonesia. Meskipun ekonomi nasional mengalami pertumbuhan, ketidaksetaraan sosial dan ekonomi tetap terlihat di berbagai tempat (Wahidah, 2022). Kota Mataram, sebagai ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Barat, juga menghadapi masalah ini. Banyak warga kota ini masih berada di bawah batas kemiskinan, dengan akses yang terbatas ke pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak. Pemerintah telah melakukan berbagai langkah untuk mengatasi masalah ini, baik melalui pembangunan infrastruktur maupun program bantuan sosial. Akan tetapi, keberhasilan dari langkah-langkah tersebut masih menjadi bahan perdebatan di masyarakat. Salah satu upaya pemerintah yang cukup terlihat adalah Program Bantuan Langsung Tunai (BLT), yang ditujukan langsung kepada masyarakat yang miskin (P. D. W. Pratama & Mudarya, 2021).

BLT adalah salah satu kebijakan fiskal yang diterapkan oleh pemerintah untuk memberikan dukungan sosial bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Program ini pertama kali diluncurkan sebagai reaksi terhadap krisis ekonomi dan kemudian diterapkan dalam berbagai situasi, termasuk selama pandemi COVID-19. Tujuan utama dari program ini adalah untuk mempertahankan kemampuan beli masyarakat dan mengurangi beban ekonomi bagi rumah tangga yang miskin (Wirahadi & NEGRI, 2024). Di Kota Mataram, diharapkan BLT bisa menjadi solusi sementara untuk mengatasi dampak ekonomi bagi warga yang kurang mampu. Namun, masih ada penilaian mengenai seberapa efektif program ini. Apakah bantuan tunai yang bersifat sementara dan langsung ini benar-benar bisa menurunkan tingkat kemiskinan secara signifikan? Pertanyaan ini menjadi fokus utama dalam penelitian ini (Tiansah, 2023).

Dalam konteks setempat, Kota Mataram menunjukkan berbagai karakteristik dalam hal sosial dan ekonomi. Di satu sisi, ada kelompok masyarakat yang berada dalam keadaan ekonomi yang cukup baik, tetapi di sisi lainnya, banyak penduduk yang masih kesulitan memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kesenjangan ini menciptakan perbedaan sosial

yang membutuhkan perhatian khusus (Alifayanti & Rois, 2023). Pemerintah daerah berkolaborasi dengan pemerintah pusat untuk menyalurkan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) guna menjangkau komunitas yang rentan. Proses penyaluran bantuan ini dilakukan melalui berbagai cara, termasuk menggunakan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) sebagai panduan utama dalam menentukan siapa yang berhak menerima bantuan. Namun, masih terdapat masalah yang berkaitan dengan ketepatan sasaran dan distribusi bantuan tersebut (Ningtyas, 2023).

Efektivitas bantuan tunai langsung tidak boleh dinilai hanya dari jumlah uang yang diberikan, tetapi juga dari bagaimana bantuan tersebut mengubah situasi ekonomi penerima manfaat. Apakah mereka yang menerima bantuan ini dapat meningkatkan taraf hidup mereka, memiliki akses yang lebih baik ke layanan dasar, dan terbebas dari kemiskinan setelah menerima bantuan. Menjawab pertanyaan ini sangat penting dan memerlukan pendekatan analitis (Aprianti, 2021). Mengukur dampak juga harus mempertimbangkan faktor waktu, artinya kita perlu menentukan apakah dampak bantuan ini bersifat sementara atau apakah bantuan tersebut mengarah pada perubahan yang bertahan lama dalam kehidupan masyarakat miskin. Dengan demikian, evaluasi komprehensif harus dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa program tersebut memenuhi tujuan awalnya (Andhika, 2024).

Penerapan BLT di Mataram dihadapkan pada berbagai hambatan baik dari segi teknis maupun sosial. Saat proses implementasinya berlangsung, sering kali timbul masalah seperti dana yang cair terlambat, kesalahan dalam pencatatan data, dan kurangnya pengawasan dari pihak berwenang. Situasi ini tentunya dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap program yang dicanangkan oleh pemerintah (Wardani, 2024). Selain itu, minimnya informasi mengenai pemanfaatan dana bantuan menyebabkan beberapa penerima menggunakan dana untuk kebutuhan konsumtif yang tidak bertahan lama. Oleh karena itu, selain memberikan uang tunai, perlu disertakan juga pendampingan sosial serta pelatihan kewirausahaan agar dapat meningkatkan kemandirian ekonomi bagi para penerima bantuan (Aprilnisa et al., 2024).

Sebagai program yang menggunakan uang dari publik, penting untuk menjaga akuntabilitas dalam pelaksanaan BLT. Diharapkan pemerintah dapat menunjukkan transparansi di setiap tahap program, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga penilaian. Keterlibatan masyarakat dalam proses pemantauan juga merupakan langkah strategis untuk mencegah penyalahgunaan dana serta memastikan bantuan sampai ke yang membutuhkan (Madani et al., 2024). Dalam konteks ini, kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat sangat diperlukan untuk mendukung keberhasilan program BLT di Mataram. Oleh karena itu, partisipasi publik menjadi faktor penting untuk menjaga kelangsungan program bantuan sosial (Zulfaslin, 2021).

Kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan faktor ekonomi, tetapi juga melibatkan aspek sosial, budaya, dan struktural. Oleh karena itu, untuk mengatasi kemiskinan, diperlukan pendekatan yang menyeluruh dan berkelanjutan. Meskipun BLT dapat berfungsi sebagai solusi sementara, perlu ada kebijakan jangka panjang dan terintegrasi untuk menciptakan perubahan yang signifikan. Penting untuk memperkuat kemampuan ekonomi masyarakat yang kurang beruntung, meningkatkan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, serta menciptakan peluang kerja yang harus diperhatikan. Dalam hal ini, BLT seharusnya dianggap sebagai bagian dari strategi yang lebih luas untuk mengurangi kemiskinan (Azhari, 2024).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai dalam mengurangi tingkat kemiskinan di Kota Mataram. Analisis akan fokus pada dampak nyata yang dialami oleh masyarakat yang menerima bantuan, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun psikologis. Penelitian ini juga akan mengidentifikasi tantangan yang dihadapi selama pelaksanaan program serta memberikan rekomendasi kebijakan yang berguna. Hasil dari kajian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam merancang kebijakan sosial yang lebih terarah dan berkelanjutan (Abbas, 2022).

Melalui penggunaan metode kualitatif dan kuantitatif, data diperoleh dengan cara mengamati lapangan, melakukan wawancara

dengan para penerima manfaat, dan memeriksa dokumen resmi pemerintah yang berkaitan dengan distribusi BLT (Pajri, 2023). Analisis yang dilakukan bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara pelaksanaan program dan perubahan dalam kesejahteraan masyarakat. Di samping itu, pandangan masyarakat tentang program BLT juga akan dianalisis untuk mengetahui seberapa baik program ini diterima oleh masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang seberapa efektif BLT sebagai salah satu cara mengurangi kemiskinan di daerah perkotaan seperti Mataram (AS, 2021).

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan warga dan pengambil kebijakan akan mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai dampak dan tantangan dalam pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (Busaini et al., 2020). Temuan dari penelitian ini tidak hanya berguna bagi Kota Mataram, tetapi juga bisa menjadi pelajaran bagi kota-kota lain yang memiliki situasi sosial ekonomi yang sama. Hal ini penting karena dalam usaha mengatasi kemiskinan, tidak ada satu solusi yang bisa diterapkan di semua tempat. Sebaliknya, diperlukan kebijakan yang adaptif, yang didasarkan pada data, dan melibatkan berbagai pihak secara aktif dalam pelaksanaannya (Hidayat et al., n.d.).

B. Method

Metodologi penelitian ini dirancang dengan cara menggunakan pendekatan Systematic Literature Review (SLR) untuk mengevaluasi seberapa efektif Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam mengurangi angka kemiskinan di Kota Mataram. Proses awal dimulai dengan mengidentifikasi dan mengumpulkan artikel-artikel ilmiah yang relevan dari berbagai sumber seperti Google Scholar, DOAJ, dan Garuda, dengan menggunakan kata kunci seperti “BLT”, “kemiskinan”, “Mataram”, dan “bantuan sosial tunai”. Setelah pencarian selesai, artikel yang ditemukan disaring secara sistematis berdasarkan kriteria inklusi, termasuk tahun terbit (2018–2024), relevansi dengan topik, dan akses penuh ke teks. Data yang berhasil dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan perangkat lunak bibliometrik VOSviewer untuk memetakan hubungan antar kata kunci dan menemukan tren penelitian.

Selain itu, pendekatan naratif digunakan untuk merangkum hasil dari literatur yang telah terpilih, sehingga memberikan pemahaman menyeluruh mengenai dampak BLT terhadap kondisi ekonomi, sosial, dan psikologis masyarakat yang berada dalam kondisi miskin, serta mengidentifikasi tantangan dalam pelaksanaan dan kebijakan yang direkomendasikan (I. N. Pratama, 2023c).

C. Result and Discussion

Analisis Bantuan Langsung Tunai Di Kota Mataram

Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Mataram memberikan dampak yang jelas bagi ekonomi rumah tangga yang miskin. Banyak orang yang menerima BLT menggunakan dana ini untuk kebutuhan penting seperti membeli bahan makanan, membayar tagihan, dan biaya pendidikan anak-anak. Ini menunjukkan bahwa BLT berfungsi sebagai bantuan ekonomi darurat untuk masyarakat yang kurang mampu (Negara et al., 2020). Bantuan ini dinilai efektif dalam menjaga daya beli kelompok miskin, terutama saat menghadapi kesulitan akibat pandemi dan inflasi. Meskipun bantuan ini hanya bersifat sementara, dampak ekonomi langsung dari BLT sangat signifikan. Banyak keluarga yang sebelumnya tidak memiliki pendapatan tetap sangat bergantung pada BLT sebagai solusi sementara. Namun, hal ini tidak selalu menjamin kemandirian ekonomi yang berkelanjutan. Penting untuk melakukan analisis lebih mendalam mengenai dampak jangka panjangnya terhadap pengurangan kemiskinan yang bersifat struktural (Bairizki, 2020).

Di sisi lainnya, pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai di Mataram menghadapi berbagai masalah teknis. Salah satu yang paling terlihat adalah ketidakakuratan dalam penentuan penerima. Banyak masyarakat melaporkan bahwa masih ada warga miskin yang tidak terdaftar sebagai penerima, sementara individu yang cukup mampu justru mendapatkan bantuan. Masalah ini sering dikarenakan oleh kurang tepatnya informasi dalam pembaruan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Awalia et al., n.d.). Ketidakakuratan data ini menunjukkan lemahnya sistem verifikasi dan validasi untuk penerima manfaat. Proses distribusi yang tidak jelas juga menyebabkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Situasi ini berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial dan dapat merusak

kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, pembaruan data dan keterlibatan masyarakat dalam pemilihan penerima harus menjadi prioritas (Rijanta et al., 2018).

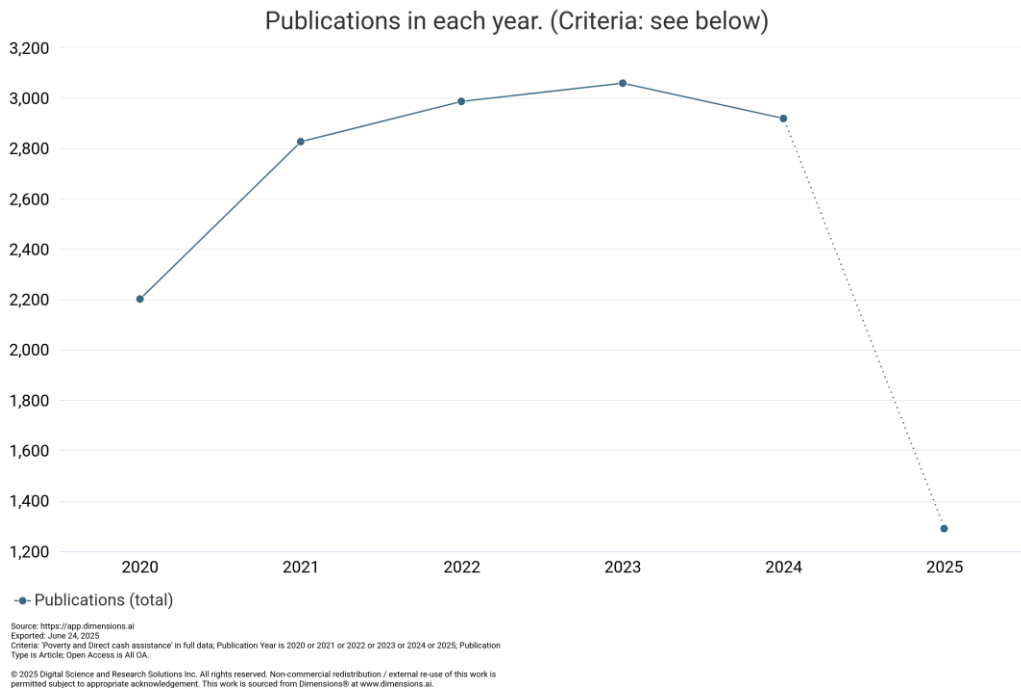
Efektivitas BLT dipengaruhi oleh bagaimana penerima menggunakan dana yang diberikan. Sayangnya, banyak penerima tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang keuangan. Sebagian besar dari mereka menggunakan bantuan untuk kebutuhan yang hanya bersifat sementara (Dewi & Andrianus, 2021). Hal ini terjadi karena kurangnya pendidikan atau panduan untuk menggunakan dana dengan bijak. Sebaiknya, bantuan ini digunakan untuk kebutuhan yang lebih produktif, misalnya modal untuk usaha kecil atau pelatihan keterampilan. Tanpa adanya strategi yang baik dalam pemanfaatan, dana BLT hanya akan menjadi solusi sementara dan tidak memberikan manfaat jangka panjang. Dalam banyak situasi, penerima kembali ke kondisi miskin setelah dana tersebut habis. Oleh karena itu, program BLT perlu disertai pendampingan ekonomi dan pendidikan keuangan agar bisa memberikan dampak yang lebih besar (Fardi & Pratama, 2023).

Dari perspektif sosial dan psikologis, penerima bantuan langsung tunai (BLT) merasakan dukungan dan ketenangan yang lebih. Pemberian uang tunai menciptakan perasaan aman dan mengurangi stres tentang kebutuhan sehari-hari. Ini sangat penting, terutama di saat situasi ekonomi tidak stabil dan akses terhadap pekerjaan yang baik sangat terbatas. Masyarakat merasa dihargai dan diperhatikan oleh pemerintah, yang berkontribusi pada peningkatan kepercayaan antar warga. Namun, rasa aman ini bersifat sementara dan akan cepat hilang setelah bantuan tidak ada. BLT tidak bisa menghilangkan kekhawatiran mengenai masa depan yang tidak pasti. Oleh karena itu, bantuan yang diberikan harus lebih menyeluruh dan terencana. Harus ada jaminan keberlangsungan berupa pelatihan, modal usaha, atau peningkatan kesempatan kerja yang konkret (Al Azizah & Agustina, 2025).

Hasil

Hasil pencarian di database pengindeks menemukan total 327,628 data, meliputi data open access sebanyak 59,615 data dan sisanya adalah close access. Dari 59,615 data tersebut, terdapat 31,779 data merupakan

artikel dan 27,836 data merupakan buku dan prosiding. Dengan demikian, terdapat 15,284 data yang akan dianalisis pada tahap selanjutnya. Sebaran jumlah data tersebut sesuai dengan Gambar 2.



Gambar 2. Distribusi Jumlah Penduduk Data Selama Satu Dekade

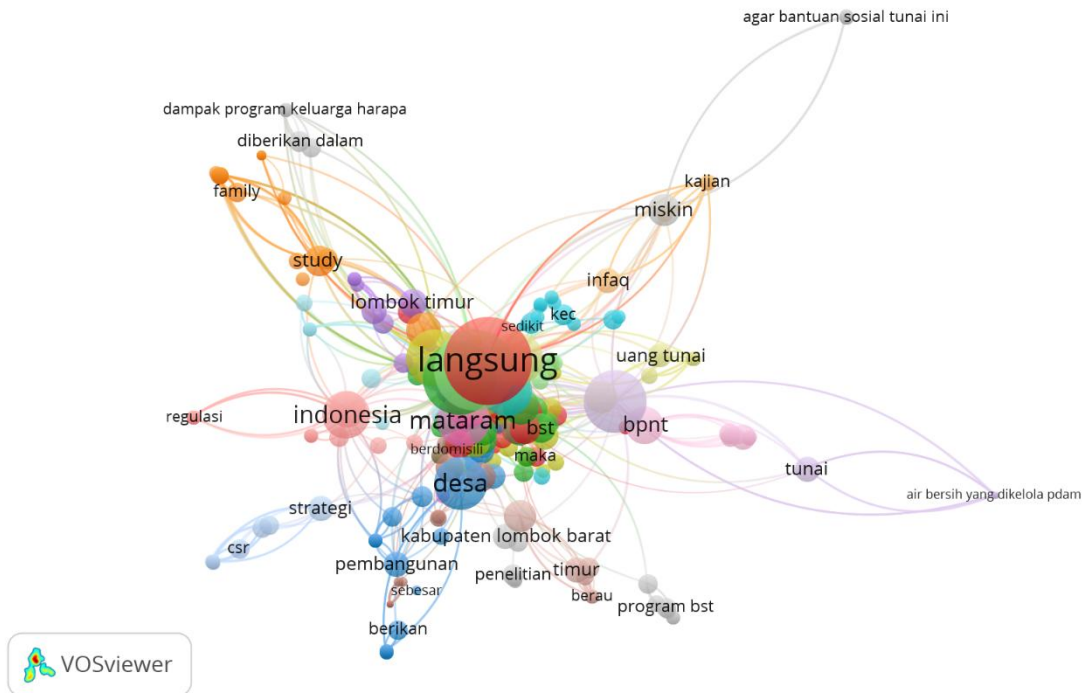
Gambar di atas menyajikan data jumlah publikasi ilmiah per tahun yang membahas topik “Poverty and Direct Cash Assistance” dalam kurun waktu 2020 hingga 2025. Terlihat bahwa terjadi peningkatan signifikan pada jumlah publikasi dari tahun 2020 (sekitar 2.200 publikasi) ke tahun 2021 (sekitar 2.850 publikasi), yang kemudian terus meningkat hingga mencapai puncaknya pada tahun 2023 dengan lebih dari 3.000 publikasi. Kenaikan ini menunjukkan bahwa topik tersebut mendapatkan perhatian besar dari kalangan akademisi, kemungkinan besar karena situasi global yang berkaitan dengan krisis ekonomi atau pandemi yang mendorong pembahasan mengenai bantuan tunai langsung sebagai solusi kemiskinan (Sucipto et al., 2024).

Namun, mulai tahun 2024, grafik menunjukkan sedikit penurunan jumlah publikasi meskipun masih berada di atas 2.900, menandakan mulai berkurangnya intensitas penelitian. Penurunan yang sangat tajam terlihat pada tahun 2025, dengan jumlah publikasi hanya sekitar 1.250. Garis putus-putus pada grafik tahun 2025 menunjukkan bahwa data tahun tersebut belum lengkap dan masih terus berkembang seiring waktu. Oleh karena itu, tren penurunan tajam di tahun 2025 belum bisa dijadikan indikator pasti menurunnya minat terhadap topik tersebut, melainkan bisa jadi disebabkan oleh keterlambatan publikasi atau proses indexing yang masih berjalan (Bawadi et al., 2023).

Pemetaan Bibliometrik Penelitian Tentang Analisis Efektifitas Program Bantuan Langsung Tunai (Blt) Dalam Mengurangi Kemiskinan Di Kota Mataram

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan di situs Publish or perish (PoP8Setup-Shortcut), ditemukan sebanyak 325 artikel jurnal yang berhubungan Analisis Efektifitas Program Bantuan Langsung Tunai (Blt) Dalam Mengurangi Kemiskinan Di Kota Mataram. Artikel-artikel ini kemudian diunduh dalam format RIS (Research Information Systems). Setelah itu, file RIS tersebut dimasukkan ke dalam perangkat lunak VOSViewer untuk dianalisis. Berikut adalah hasil analisisnya:

Gambar 1. Visualisasi network peta perkembangan penelitian Tentang Analisis Efektifitas Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dalam Mengurangi Kemiskinan Di Kota Mataram



Sumber: Data diolah, software VOSViewer 1.6.20.

Gambar di atas merupakan visualisasi dari analisis ko-kemunculan kata kunci yang dibuat dengan perangkat lunak VOSviewer. Gambar tersebut menggambarkan hubungan antara kata kunci yang sering muncul bersamaan dalam literatur terkait bantuan tunai, khususnya mengenai Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Indonesia. Kata kunci yang paling menonjol diwakili oleh lingkaran yang lebih besar, seperti "langsung," "desa," "mataram," dan "indonesia." Hal ini menunjukkan bahwa topik utama penelitian ini berpusat pada penyaluran langsung BLT di tingkat desa dan di wilayah Kota Mataram. (Andini et al., 2024).

Kata-kata seperti "bpnt", "uang tunai", dan "miskin" sering muncul dalam jaringan terdekat, menunjukkan hubungan dekat antara

BLT, keadaan ekonomi masyarakat yang kurang mampu, dan bantuan lainnya seperti Bantuan Pangan Non-Tunai. Selain itu, kemunculan istilah seperti “strategi”, “regulasi”, “csr”, dan “pembangunan” mengindikasikan adanya aspek kebijakan dan kerjasama antara berbagai sektor dalam pelaksanaan program. Beberapa istilah seperti “infaq”, “kajian”, dan “study” mengungkapkan partisipasi dari sudut pandang religius dan akademis dalam diskusi. Visualisasi ini memberikan gambaran bahwa program bantuan tunai memiliki kompleksitas dan terkait dengan berbagai elemen sosial, geografis, serta kebijakan, sehingga pelaksanaannya memerlukan pendekatan yang melibatkan berbagai sektor dan berbasis data. (Sucipto et al., 2024).

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan pelaksanaan BLT masih tidak maksimal. Adanya lemahnya sistem pemantauan membuat penyimpangan, seperti penarikan dana oleh pihak tidak bertanggung jawab atau pengurangan jumlah bantuan, bisa terjadi. Ketidakjelasan dalam proses distribusi memberikan ruang bagi penyalahgunaan kekuasaan (Otheliansyah et al., 2023). Hal ini bisa mengurangi efektivitas program dan menimbulkan ketidakadilan di masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus bekerja sama dengan organisasi non-pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan pertanggungjawaban program. Melibatkan masyarakat dalam pengawasan akan menambah rasa memiliki terhadap program bantuan. Selain itu, harus ada hukuman tegas bagi mereka yang terbukti menyalahgunakan dana bantuan (Rasid et al., 2024).

Dalam perspektif ekonomi daerah, BLT belum sepenuhnya berhasil untuk memajukan sektor produktif bagi masyarakat yang kurang mampu. Bantuan dalam bentuk uang tunai yang bersifat konsumtif tidak mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Setelah bantuan tersebut habis, penerima biasanya kembali ke keadaan semula (Choiriyah, 2018). Hal ini menunjukkan bahwa BLT tidak cukup efektif untuk menghasilkan perubahan struktural dalam kehidupan orang-orang yang hidup dalam kemiskinan. Oleh karena itu, penting untuk menggabungkan program BLT dengan inisiatif pemberdayaan ekonomi. Contohnya, penerima bantuan dapat diarahkan untuk mengikuti

pelatihan keterampilan atau diberikan dana untuk usaha kecil. Pendekatan ini dapat meningkatkan kemampuan ekonomi keluarga yang kurang mampu dalam jangka panjang. Dengan cara ini, BLT akan menjadi lebih dari sekadar bantuan, tetapi juga sebagai langkah menuju kemandirian ekonomi (Andayani et al., 2024).

Pandangan umum masyarakat tentang BLT cenderung positif. Banyak orang merasa bahwa bantuan ini menunjukkan keberadaan negara dalam masa-masa sulit. Di sisi lain, terdapat cukup banyak kritik terhadap ketidakberaturan dalam pencairan dana dan tidak tepatnya penerima bantuan. Mereka menginginkan agar pemerintah memperbaiki cara distribusi agar lebih adil dan merata (Zahrawati, 2020). Kepercayaan masyarakat terhadap program bantuan sosial sangat tergantung pada sejauh mana transparansi dan keadilan dalam pelaksanaannya. Jika hal ini tidak diperbaiki, dukungan dan partisipasi masyarakat dalam program ini akan menurun. Oleh sebab itu, pengelolaan pandangan publik sangat penting untuk suksesnya BLT. Pemerintah harus menciptakan komunikasi yang jelas, terbuka, dan responsif terhadap keluhan dari masyarakat (I. N. Pratama, 2023b).

Penelitian ini menunjukkan pula bahwa program BLT tidak dilengkapi dengan evaluasi yang teratur dan terstruktur. Evaluasi sangat penting untuk menilai keberhasilan program dari berbagai sudut pandang, termasuk dampak ekonomi, sosial, dan psikologis. Tanpa adanya evaluasi, kebijakan hanya akan dilaksanakan secara rutin tanpa adanya peningkatan. Sementara itu, dinamika kemiskinan memiliki sifat yang sangat rumit dan cepat berubah. Pemerintah perlu memiliki sistem pemantauan dan evaluasi yang didasarkan pada data yang akurat. Dengan ini, kebijakan dapat disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan secara lebih tanggap. Selain itu, evaluasi akan mendukung proses pengambilan keputusan jangka panjang mengenai kelanjutan atau pengembangan program bantuan. Tanpa evaluasi, efektivitas program akan diragukan dalam hal keberlanjutan (I. N. Pratama, 2023a).

Akuntabilitas program BLT adalah faktor krusial yang menentukan apakah program ini berhasil atau tidak (Syawie, 2011). Penggunaan dana publik harus dilakukan dengan transparansi yang jelas.

Setiap langkah dari proses, mulai dari perencanaan, verifikasi penerima, distribusi, hingga pelaporan, perlu dilakukan secara terbuka. Tanpa transparansi ini, program berisiko mengalami praktik korupsi dan penyalahgunaan. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memiliki sistem yang baik untuk melaporkan dan mendokumentasikan penggunaan dana, serta melibatkan auditor independen dalam proses tersebut. Selain itu, penting bagi media untuk terlibat dalam memantau dan melaporkan perkembangan program BLT. Media berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat. Dengan adanya akuntabilitas yang kuat, kepercayaan masyarakat terhadap program bantuan dapat meningkat (Faradilla et al., 2024).

Keberhasilan program BLT di Mataram sangat dipengaruhi oleh kerjasama semua pihak. Pemerintah dari semua tingkatan, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah perlu bersinergi agar program ini sukses. Tidak ada orang atau kelompok yang bisa menyelesaikan masalah kemiskinan sendiri. Partisipasi aktif dari masyarakat dalam pelaksanaan serta pengawasan program dapat meningkatkan hasilnya (Johan, 2020). Selain itu, kehadiran organisasi lokal sangat penting untuk menjangkau komunitas atau kelompok yang sulit dijangkau oleh pemerintah. Kerjasama dari berbagai sektor ini akan menciptakan kondisi yang mendukung untuk mengurangi kemiskinan. Program BLT hanya akan berhasil jika semua pihak bekerja dengan semangat saling membantu dan keterbukaan (Mardiah et al., 2024).

Program Bantuan Langsung Tunai di Mataram menunjukkan dampak positif dalam mengurangi efek ekonomi jangka pendek bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Banyak orang yang menerima bantuan ini memanfaatkan dana untuk kebutuhan pokok seperti makanan, biaya sekolah, dan kebutuhan rumah sehari-hari. Program ini telah terbukti berhasil dalam menjaga daya beli masyarakat saat krisis melanda, terutama selama pandemi dan saat inflasi meningkat. Dengan adanya bantuan tunai, keluarga-keluarga kurang mampu dapat bertahan dan tidak jatuh lebih dalam ke dalam kesulitan. Meski demikian, bantuan yang bersifat sementara ini membuatnya kurang efektif dalam membangun kemandirian ekonomi jangka panjang. BLT tidak secara

langsung meningkatkan produktivitas atau pendapatan yang berkelanjutan bagi para penerimanya. Karena itu, BLT perlu diiringi dengan langkah-langkah lain agar dapat menyelesaikan masalah kemiskinan secara lebih mendasar. Bantuan ini seharusnya berfungsi sebagai penghubung menuju program pemberdayaan ekonomi (Warsyena & Wibisono, 2021).

Dari sisi pemanfaatan dana, banyak penerima BLT yang belum memiliki kemampuan untuk mengelola uang secara produktif. Bantuan cenderung digunakan untuk keperluan konsumtif harian tanpa adanya rencana jangka panjang. Pelaksanaan bantuan langsung tunai masih menghadapi sejumlah masalah teknis, khususnya saat menentukan siapa yang berhak menerima bantuan. Sering kali, penempatan sasaran tidak tepat karena data yang tidak akurat dalam sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Beberapa individu yang seharusnya tidak layak justru muncul sebagai penerima, sementara beberapa yang kurang mampu tidak terdaftar. Isu ini menunjukkan adanya kelemahan dalam proses verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh pemerintah. Situasi ini bisa menimbulkan rasa cemburu sosial antara masyarakat yang menerima dan yang tidak menerima bantuan. Ketidakadilan dalam distribusi juga memengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap program sosial pemerintah. Oleh karena itu, sangat penting untuk memperbarui data secara regular dan melibatkan masyarakat dalam proses verifikasi. Metode partisipatif dianggap dapat meningkatkan keakuratan serta keadilan dalam distribusi bantuan (Paputungan et al., 2019).

Kekurangan pendidikan mengenai keuangan yang diberikan kepada penerima bantuan memperburuk situasi ini. Dengan adanya pelatihan dan bimbingan, dana bantuan seharusnya bisa digunakan sebagai modal usaha kecil atau untuk investasi yang produktif. Tanpa adanya pendampingan, BLT hanya menjadi solusi sementara yang tidak menghasilkan efek jangka panjang. Oleh karena itu, sangat penting untuk memasukkan program pelatihan keterampilan dan kewirausahaan bagi para penerima. Langkah ini akan menambah nilai pada bantuan yang mereka terima. Dengan begitu, masyarakat bisa lebih mandiri secara

ekonomi dan tidak terus-menerus bergantung pada bantuan sosial (Hariandja & Budiman, 2020).

Dari sudut pandang psikologis, pemberian bantuan langsung tunai menimbulkan perasaan aman dan mengurangi rasa stres yang dialami oleh komunitas berpendapatan rendah. Para penerima merasakan kehadiran serta perhatian negara terhadap keadaan mereka, terutama pada masa-masa yang sulit. Bantuan tersebut dapat memberikan sedikit ketenangan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dampak positif ini juga berkontribusi terhadap peningkatan rasa percaya diri dan solidaritas di antara tetangga penerima bantuan. Meski demikian, rasa aman yang dirasakan bisa bersifat temporer dan cepat menghilang saat bantuan dihentikan. Tanpa adanya tindakan lanjutan, keadaan bisa kembali seperti semula. Oleh karena itu, penting untuk ada keberlanjutan program dengan menciptakan kesempatan kerja dan menyediakan akses modal. Gabungan dari dukungan ekonomi dan sosial sangat krusial untuk membangun ketahanan masyarakat dalam jangka waktu yang panjang (Selviana, 2016).

Informasi dari pemetaan bibliometrik menunjukkan bahwa perhatian akademis terhadap bantuan tunai langsung dan kemiskinan meningkat antara tahun 2020 sampai 2023. Terjadi lonjakan jumlah publikasi yang signifikan, terutama selama masa pandemi, ketika BLT menjadi salah satu kebijakan untuk mengatasi krisis ekonomi. Hal ini membuktikan bahwa BLT menjadi tema utama dalam diskusi akademis sebagai alat untuk mengurangi kemiskinan. Meskipun pada tahun 2024 dan 2025 jumlah publikasi sedikit berkurang, tren ini tidak menunjukkan penurunan minat yang nyata. Mungkin ini disebabkan oleh keterlambatan dalam publikasi atau proses pengindeksan yang belum selesai. Fakta ini menunjukkan perlunya evaluasi dan penelitian yang berkelanjutan mengenai efektivitas BLT. Dengan adanya data dan analisis yang selalu diperbaharui, kebijakan dapat disesuaikan dengan lebih tepat. Penelitian juga memiliki peran penting dalam meningkatkan desain program bantuan sosial di masa yang akan datang (Andhika, 2024).

Visualisasi kata kunci menggunakan perangkat lunak VOSviewer menunjukkan bahwa kata-kata seperti “langsung,” “desa,” dan “miskin”

sering muncul dalam tulisan tentang BLT. Ini menunjukkan bahwa penerapan BLT sangat terkait dengan kondisi desa dan tingkat kemiskinan di area tersebut. Selain itu, kata-kata seperti “strategi,” “regulasi,” dan “csr” menggambarkan partisipasi berbagai sektor dalam program ini. Ini mengartikan bahwa BLT tidak bisa berjalan sendiri, tetapi perlu dukungan dari kerangka regulasi dan kebijakan yang lengkap. Kehadiran istilah seperti “kajian” dan “infaq” menunjukkan adanya sumbangan dari aspek akademis dan religius dalam pembahasan mengenai BLT. Oleh karena itu, penting bagi pelaksanaan BLT untuk memperhatikan beragam pihak yang ikut terlibat, termasuk pemerintah, akademisi, dan organisasi keagamaan. Dengan pendekatan yang melibatkan banyak sektor, efektivitas dan jangkauan program bantuan tunai dapat meningkat. Dengan cara ini, BLT dapat berkontribusi pada solusi kolaboratif yang lebih menyeluruh (Rafni, 2025).

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa sistem pengawasan untuk pelaksanaan BLT di lapangan sangat lemah. Banyak kejadian penyimpangan dan kurangnya transparansi yang muncul selama proses distribusi dana. Ketidakakuratan dalam laporan dan pengawasan menciptakan kesempatan bagi tindakan korupsi atau manipulasi data. Hal ini tentu merugikan penerima manfaat yang seharusnya mendapatkan hak mereka secara penuh. Oleh karena itu, penting untuk menerapkan sistem akuntabilitas yang ketat dan terbuka di setiap tahap program. Melibatkan masyarakat dan organisasi non-pemerintah dalam proses pengawasan sangatlah penting untuk memastikan integritas program. Dengan adanya mekanisme pengaduan dan pemantauan yang terbuka, kemungkinan penyimpangan dapat diminimalkan. Transparansi ini akan membantu memulihkan kepercayaan publik terhadap bantuan pemerintah. Dengan cara ini, efektivitas BLT dapat lebih terjaga dan hasilnya lebih sesuai dengan tujuan yang diinginkan (Baridi & Salam, 2025).

Dalam jangka panjang di sektor ekonomi, program bantuan langsung tunai atau BLT belum sepenuhnya berhasil meningkatkan produktivitas para penerimanya secara signifikan. Bantuan tunai yang bersifat untuk konsumsi tidak cukup efektif dalam mendorong

pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal maupun menciptakan peluang usaha baru. Ini menunjukkan bahwa jika BLT tidak disertai dengan upaya pemberdayaan ekonomi, maka akan menjadi sebuah solusi yang bersifat sementara. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengintegrasikan BLT dengan program yang fokus pada peningkatan kapasitas dan akses terhadap sumber daya ekonomi. Para penerima seharusnya diberikan pelatihan keterampilan, akses ke pasar, serta bimbingan dalam berwirausaha. Dengan cara ini, bantuan tidak hanya akan mengurangi kemiskinan sementara, tetapi juga mendorong perubahan ekonomi yang berkelanjutan. Program BLT akan menjadi lebih efektif jika dipandang sebagai langkah awal menuju kemandirian ekonomi. Kolaborasi antara bantuan dan pemberdayaan sangat penting untuk menciptakan perubahan yang signifikan dalam kehidupan masyarakat yang kurang mampu (Sulaiman, 2025).

Secara keseluruhan, kesuksesan BLT di Kota Mataram sangat tergantung pada kerjasama semua pihak yang terlibat. Kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, organisasi non-pemerintah, masyarakat, dan akademisi sangat penting dalam merancang dan melaksanakan kebijakan bantuan sosial. Jika tidak ada partisipasi aktif dari mereka, program ini mungkin tidak akan berhasil mencapai tujuannya. Keterlibatan masyarakat juga sangat diperlukan untuk mengawasi dan mengevaluasi program secara langsung. Keterlibatan mereka akan membangun rasa kepemilikan dan meningkatkan tanggung jawab dalam pelaksanaan. Selain itu, program juga harus berkelanjutan dengan melakukan evaluasi secara teratur yang didasarkan pada data dan kondisi nyata di lapangan. Dengan dukungan lintas sektor dan pendekatan yang berdasarkan bukti, BLT bisa menjadi bagian dari solusi jangka panjang dalam mengatasi kemiskinan. Oleh karena itu, reformasi dalam program bantuan sosial perlu segera dilaksanakan dan tidak bisa ditunda (Haidar & Widyaningsih, 2025).

D. Conclusion

Hasil dari studi ini menunjukkan bahwa Program Bantuan Langsung Tunai di Kota Mataram memberikan dampak yang baik untuk

memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang kurang mampu dalam waktu singkat. BLT terbukti berhasil menjaga daya beli dan memberikan rasa aman sementara bagi para penerimanya di tengah tekanan ekonomi seperti pandemi dan inflasi. Namun, ada beberapa masalah yang dihadapi oleh program ini, seperti kurang tepatnya penargetan, sistem pengawasan yang lemah, serta kurangnya pendidikan dan pendampingan untuk para penerima. Ini menyebabkan dana yang ada tidak digunakan secara efektif dan membuat penerima menjadi bergantung tanpa ada peningkatan dalam kemandirian ekonomi mereka.

Oleh karena itu, Untuk menjadikan BLT alat yang efektif dalam mengatasi kemiskinan, perlu ada perbaikan dalam cara program tersebut dilaksanakan. Ini termasuk perbaikan data penerima yang lebih tepat melalui DTKS, peningkatan keterbukaan dan tanggung jawab dalam distribusi, serta penggabungan program bantuan dengan pelatihan kewirausahaan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Di samping itu, melakukan evaluasi program secara teratur dan melibatkan masyarakat serta LSM dalam pengawasan sangat penting untuk memastikan keberlanjutan dan keberhasilan BLT sebagai bagian dari strategi jangka panjang dalam mengatasi kemiskinan di kota-kota seperti Mataram.

Referensi

- Abbas, A. (2022). *Strategi Penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat Di Desa Makkawaru Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang*. IAIN Parepare.
- Al Azizah, N. D., & Agustina, I. F. (2025). IMPLEMENTASI BANTUAN SOSIAL (BANSOS) DALAM UPAYA PENGURANGAN KEMISKINAN DESA BANJARBENDO. *Journal Publicuho*, 8(1), 322–331.
- Alifayanti, A. B., & Rois, I. (2023). PENGEMBANGAN WISATA HALAL PADA DESTINASI WISATA AIK NYET DESA BUWUN SEJATI KABUPATEN LOMBOK BARAT Aziza. *Jurnal Konstanta Ekonomi Pembangunan*, 2(1), 213–227.
- Andayani, S., Pratama, D. W., Muhammad, R. E. N., Pratama, I. N., & Kusuma, L. S. T. (2024). Analisis Penyebab Kemiskinan Yang Terjadi Di Kabupaten Lombok Utara. *SEMINAR NASIONAL LPPM UMMAT*, 3, 762–769.

- Andhika, M. R. (2024). *Strategi Pemerintah Gampong Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Bantuan Langsung Tunai (Studi Kasus Gampong Neuhen, Kecamatan Mesjid Raya, Kabupaten Aceh Besar)*. UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Andini, Y., Nilhak, Z., Fajriansyah, D., Joni, M., Rabiah, A., Khadraturun, M. A., Imara, I. S., Tiara, T., Zarwini, R., & Pratama, I. N. (2024). ANALISIS DINAMIKA KEMISKINAN DI NUSA TENGGARA TIMUR: STUDI KASUS FLORES. *SEMINAR NASIONAL LPPM UMMAT*, 3, 877–886.
- Aprianti, B. L. (2021). *Tinjauan hukum islam tentang praktik pekerja anak sebagai pedagang asongan di daerah wisata Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika kabupaten Lombok Tengah*. UIN Mataram.
- Aprilnisa, N. N., Ningsih, P. A., & Siregar, F. A. (2024). ANALISIS EFEKTIFITAS PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM MENGENTASKAN KEMISKINAN DI KELURAHAN SIMPANG III SIPIN KOTA JAMBI. *Jurnal Studi Multidisipliner*, 8(6).
- AS, M. S. (2021). Implementasi Sociopreneurship Berbasis Lingkungan Sebagai Reduksi Pengangguran Di Kota Mataram. *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 9(1), 67–74.
- Awalia, S., Sumayya, S. A., Trip, J., Nomor, J., Blok, A., Kec, K., & Banten, K. S. (n.d.). *Analisis Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai dalam Mengurangi Kemiskinan di Pedesaan*. 156–175.
- Azhari, N. (2024). *Analisis Akuntansi Keperilakuan Pengelolaan dan Penerimaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Di Desa Batulappa Kabupaten Pinrang*. IAIN Parepare.
- Bairizki, A. (2020). *Manajemen Sumber Daya Manusia (Tinjauan Strategis Berbasis Kompetensi)-Jilid 1 (Vol. 1)*. Pustaka Aksara.
- Baridi, M., & Salam, A. (2025). *Perancangan Website untuk Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kantor Keuchik Gampong Ceurih , Kecamatan Ulee Kareng , Kota Banda Aceh Abstrak*. 5(1), 49–60.
- Bawadi, Z., Ratnasari, P., Raya, P., Raya, P., Waktu, T., Tungku, T., Pulau, K., & Kabupaten, M. (2023). *Jurnal Administrasi Publik (JAP) EFEKTIVITAS PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA KECAMATAN PULAU MALAN Jurnal Administrasi Publik (JAP)*. 9(1), 71–82.
- Busaini, B., Rinuastuti, B. H., Feriyadin, F., Wijanarko, A., Assidiq, K. A., Hadinata, L. A., & Rahmaningsih, S. (2020). Peran Pemuda Dalam Membangun Citra Pariwisata Halal Di Desa Setanggor. *Jmm Unram - Master of Management Journal*, 9(3), 295–304.

<https://doi.org/10.29303/jmm.v9i3.574>

- Choiriyah, C. (2018). Implementasi Kebijakan Publik dalam Penanganan Kemiskinan; Studi Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kelurahan Kuto Batu Kecamatan Ilir Timur II. *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 3(2), 17-30. <https://doi.org/10.36908/isbank.v3i2.42>
- Dewi, R., & Andrianus, H. F. (2021). Analisis pengaruh kebijakan bantuan langsung tunai (BLT) terhadap kemiskinan di indonesia periode 2005-2015. *MENARA: Ilmu*, 15(2), 77-84.
- Faradilla, I., Putra, M. A. R., & Pratama, I. N. (2024). Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Dari Program Keluarga Harapan di Kabupaten Lombok Timur. *Seminar Nasional LPPM Ummat*, 3, 887-895.
- Fardi, M., & Pratama, I. N. (2023). Transparansi Pendataan Program Bantuan Sosial Tunai dalam Penanggulangan Kemiskinan di Lingkungan Bebidas Kelurahan Pegesangan Kota Mataram. *Journal of Social and Policy Issues*, 150-155.
- Haider, A., & Widyaningsih, T. W. (2025). *Sistem Pendukung Keputusan untuk Menentukan Penerimaan Bantuan Langsung Tunai Menggunakan Metode Weighted Product*.
- Hariandja, T. R., & Budiman, N. T. (2020). Pelaksanaan Bantuan Langsung. *Indonesian Journal of Law and Islamic Law (IJLIL)*, 2, 271-293.
- Hidayat, W., Evendi, A., & Nasrullah, A. (n.d.). PENGARUH PARIWISATA BERBASIS MASYARAKAT DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN LOMBOK BARAT.
- Johan, A. (2020). BUDAYA KEMISKINAN DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI INDONESIA *CULTURE OF POVERTY IN POVERTY REDUCTION IN INDONESIA*. *Socio Informa*, 6(02), 114-132.
- Madani, L. A., Hizmi, S., & Wahyuni, E. S. (2024). Peranan Guide Lokal dan Masyarakat Untuk Meningkatkan Eksistensi Desa Wisata Sasak Ende. *Juremi: Jurnal Riset Ekonomi*, 3(6), 961-966.
- Mardiah, F., Islami, J., Irawan, M. F., & Pratama, I. N. (2024). Meninjau Dampak Kemiskinan Yang Terjadi Terhadap Masyarakat Kabupaten Dompu. *SEMINAR NASIONAL LPPM UMMAT*, 3, 807-821.
- Negara, J. A., Ilmu, F., & Dan, S. (2020). Sistem Digital Tata Kelola Pemerintahan Daerah (Digital Local Government) I Gede Agus Wibawa dan Lilik Antarini. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 5(1), 57-71.

- <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/public-inspiration>
- Ningtyas, A. (2023). *Evaluasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kelurahan Gedung Johor*. Universitas Medan Area.
- Otheliansyah, G., Hizwar, R., Perbendaharaan, D. J., & Keuangan, K. (2023). Pengaruh Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dan Kemandirian Desa di Masa Pandemi terhadap Kemiskinan Desa di Indonesia. *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, 4(2), 94–105. <https://doi.org/10.33105/jmp.v4i2.409>
- Pajri, N. (2023). *Implementasi pariwisata halal dan pengaruhnya terhadap volume kunjungan wisatawan ke Desa Wisata Ende Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah*. UIN Mataram.
- Paputungan, S., Pioh, N., & Waworundeng, W. (2019). *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Volume 1 No. 1 Tahun 2019 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi*. 1(1), 1–12.
- Pratama, I. N. (2023a). Analisis Determinan Kemiskinan di Kabupaten Sumbawa. *Journal Law and Government*, 1(2), 143–153.
- Pratama, I. N. (2023b). Dinamika Kemiskinan Di Kota Mataram: Analisis Perubahan Tingkat Kemiskinan Dalam Dekade Terakhir. *SEMINAR NASIONAL LPPM UMMAT*, 2, 1216–1222.
- Pratama, I. N. (2023c). Skema Pengentasan Kemiskinan Ditinjau Dari Perspektif Collaborative Governance Di Kota Mataram. *Jurnal Komunikasi Dan Kebudayaan*, 10(1), 61–77. <https://doi.org/10.59050/jkk.v10i1.221>
- Pratama, P. D. W., & Mudarya, I. N. (2021). Evaluasi Program Keluarga Harapan (Pkh) Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Desa Sanggalangit Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng. *Locus*, 13(2), 62–78.
- Rafni, A. (2025). *Implementasi kebijakan program Langsung Tunai Dana Desa*.
- Rasid, A., Apriadi, O., Nurdiana, N., Pratama, I. N., & Subandi, A. (2024). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten Lombok Barat. *SEMINAR NASIONAL LPPM UMMAT*, 3, 725–733.
- Rijanta, R., Hizbaron, D. R., & Baiquni, M. (2018). *Modal sosial dalam manajemen bencana*. UGM PRESS.
- Selviana. (2016). Bantuan Langsung Tunai Selviana. *Equilibrium Pendidikan Sosiologi*, IV(1), 1–10.
- Sucipto, A., Budiman, B., Phitaloka, T. I., & Pratama, I. N. (2024). Strategi Pengentasan Kemiskinan Berbasis Potensi Kearifan Lokal di

- Kabupaten Lombok Tengah. *SEMINAR NASIONAL LPPM UMMAT*, 3, 485-495.
- Sulaiman, O. K. (2025). *Implementasi Algoritma Density Based Spatial Clustering of Applications with Noise (DBSCAN) pada Aplikasi Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Online di Desa Bahtera Makmur Rokan Hilir - Riau*. 1-11.
- Syawie, M. (2011). Kemiskinan Dan Kesenjangan Sosial. *Sosio Informa*, 16(3), 213-219. <https://doi.org/10.33007/inf.v16i3.47>
- Tiansah, A. (2023). PROSES KOMUNIKASI DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI KABUPATEN MUSI RAWAS PROVINSI SUMATERA SELATAN. *Kinesik*, 10(3), 285-300.
- Wahidah, N. (2022). *Peran POKDARWIS dalam mengembangkan kain tenun sebagai potensi wisata Dusun Mengilok Desa Batujai Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah*. UIN Mataram.
- Wardani, R. (2024). *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KOMUNAL KAIN TENUN MASYARAKAT SADE BERDASARKAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (STUDI KASUS DI DUSUN SADE DESA REMBITAN KECAMATAN PUJUT KABUPATEN LOMBOK TENGAH)*. UIN Mataram.
- Warsyena, R., & Wibisono. (2021). Nusantara Hasana Journal. *Nusantara Hasana Journal*, 1(7), 132-137.
- Wirahadi, D., & NEGRI, U. I. (2024). *Dampak pembangunan taman wisata Sintung Park terhadap kehidupan sosial keagamaan masyarakat di Desa Sintung Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah*. UIN Mataram.
- Zahrawati, F. (2020). Pembebasan Jerat Feminisasi Kemiskinan. *AL MA'ARIEF: Jurnal Pendidikan Sosial Dan Budaya*, 2(1), 9-16. <https://doi.org/10.35905/almaarief.v2i1.1327>
- Zulfaslin, Z. (2021). *Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai 2020 di Kelurahan Macorawalie Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap (analisis Siyasa Dusturiyah)*. IAIN Parepare.